

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah secara filosofis diartikan sebagai pemberdayaan dan instensifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Menurut UU Nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat telah membagi berbagai sumber pembiayaan kepada daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dilimpahkan. Menurut ketentuan yang ada dalam pasal 2 undang-undang nomor 33 tahun 2004 pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari a) pendapatan asli daerah; b) dana perimbangan; dan c) lain lain pendapatan yang sah.

Kemandirian suatu daerah merupakan salah satu tujuan penting dari pelaksanaan otonomi daerah oleh karena itu salah satu indikator penting yang dapat mengukur kemandirian suatu daerah dalam penyelenggaran dan pembangunan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian PAD menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Daerah otonom harus mampu menggali sumber sumber keuangannya, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai

penyelenggaraan pembangunan daerahnya (Mahmudi, 2009:3). Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah. Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. PAD yang kecil akan mempersulit daerah dalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Padahal dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri, dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka setiap daerah diwajibkan untuk mengoptimalkan peran PAD.

Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ekonomi suatu daerah dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Pada umumnya perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat diketahui melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan sumbangan setiap sektor terhadap nilai PDRB tersebut. PDRB pada dasarnya merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang

ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Maka dilakukan Pengeluaran pemerintah yang sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat, jika pengeluaran pemerintah besar misalnya untuk belanja modal, pembangunan infrastruktur, maka kegiatan ekonomi akan meningkat, seperti investasi sehingga PAD juga meningkat (Tobing, 2015:6).

Berdasarkan uraian di atas dan keingintahuan penulis mengenai seberapa jauh kemandirian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh PDRB perkapita dan pengeluaran pemerintah perkapita terhadap PAD perkapita.

PAD sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari PAD, karena dana tersebut berasal dari masyarakat daerah

setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Selama kurun waktu 2011-2015, di ketahui bahwa nilai PAD perkapita di NTT cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang berarti daerah ini berhasil dalam pembangunan ekonomi dan semakin mandiri. Hal ini memberikan indikasi yang positif terhadap kemajuan ekonomi di Provinsi NTT, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**PAD Perkapita di Provinsi NTT 2011-2015 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Ribu Rupiah)**

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2011	222.808
2012	240.357
2013	256.551
2014	342.536
2015	367.744

Sumber: NTT Dalam Angka (2016), diolah.

Tabel 1.1 menunjukkan trend pertumbuhan positif dari PAD perkapita Provinsi NTT yang bisa jadi merupakan kontribusi dari PDRB perkapita, selama lima tahun terakhir 2011-2015 PDRB perkapita di Provinsi NTT terus mengalami kenaikan. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga kemampuan masyarakat membayar pajak

meningkat. Perkembangan PDRB perkapita di Provinsi NTT dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB perkapita, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**PDRB Perkapita di Provinsi NTT Tahun 2011-2015 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rupiah)**

Tahun	PDRB
2011	2775.813
2012	2870.392
2013	2975.059
2014	3073.848
2015	3175.591

Sumber: NTT Dalam Angka (2016), diolah.

Tabel 1.2 menunjukkan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha Provinsi NTT Tahun 2011 sampai 2015 yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan PDRB perkapita. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB perkapita menunjukkan bahwa Provinsi NTT mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Namun demikian, PAD perkapita bukan satu-satunya ditentukan oleh PDRB perkapita saja. Selain PDRB perkapita juga bisa ditentukan oleh pengeluaran pemerintah perkapita, data pengeluaran pemerintah perkapita di Provinsi NTT juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah ditujukan salah satunya untuk belanja modal, infrastruktur, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga nantinya berpengaruh pada peningkatan PAD perkapita. Masyarakat yang sejahtera merupakan salah satu keberhasilan dari

daerah tersebut karena mampu mengatur keuangan daerahnya untuk hal-hal yang meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang akan berdampak pada meningkatnya PAD perkapita. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Pengeluaran Pemerintah Perkapita di Provinsi NTT**  
**Tahun 2011-2015 Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Ribu Rupiah)**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2011	821.51
2012	1270.79
2013	1280.26
2014	1356.39
2015	1488.05

Sumber: NTT Dalam Angka (2016), diolah.

Tabel 1.3 menunjukkan realisasi pengeluaran pemerintah perkapita Provinsi NTT tahun 2011 sampai 2015. Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pengeluaran pemerintah perkapita Provinsi NTT terus meningkat selama lima tahun terakhir ini.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 1990-2015”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita terhadap PAD Perkapita Provinsi NTT tahun 1990-2015.
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Perkapita terhadap PAD Perkapita Provinsi NTT tahun 1990-2015.

3. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita dan Pengeluaran Pemerintah Perkapita secara bersama-sama terhadap PAD Perkapita Provinsi NTT tahun 1990-2015.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh PDRB Perkapita terhadap PAD Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1990-2015.
2. Mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Perkapita terhadap PAD Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1990-2015.
3. Mengetahui pengaruh PDRB Perkapita dan Pengeluaran Pemerintah Perkapita terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1990-2015.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengambilan kebijakan oleh pemerintah terkait dengan peningkatan kemandirian daerah bagi kemajuan perekonomian daerah.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi kemajuan pengembangan penelitian.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti tentang pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTT, khususnya dalam meningkatkan PAD dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **1.5. Hipotesis Penelitian**

Adapun hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Diduga, PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap PAD Perkapita Provinsi NTT tahun 1990-2015.
- 2) Diduga, Pengeluaran Pemerintah Perkapita berpengaruh positif terhadap PAD Perkapita Provinsi NTT tahun 1990-2015.
- 3) Diduga, secara bersama-sama variabel independen (PDRB Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Perkapita) berpengaruh terhadap variabel dependen (PAD Perkapita) di Provinsi NTT tahun 1990-2015.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini akan di bagi menjadi lima (5) bab, yaitu

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan menjelaskan landasan teori dan studi terkait. Landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi pendapatan asli daerah yang dipengaruhi oleh variabel PDRB dan pengeluaran pemerintah dan studi terkait yang berisi tentang penelitian sebelumnya.

### Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, metode analisis data, dan uji-uji yang akan digunakan dalam penelitian serta batasan operasional.

### Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan hasil analisis data dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

### Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

